

Pengaruh Pendataan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Edy Sahlan³, Yusuf², Dodo Susanto³

^{1,2,3}STES Harapan Bima NTB

Article history:

Accepted: 21 Februari 2022

Publish: 11 Maret 2022

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2022. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Maka diperoleh saran-saran sebagai berikut; Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal mengatur anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya dibanding anggaran yang lebih mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah ; Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Edy Sahlan

STES Harapan Bima NTB

Email : Edvsahlan22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial. Berbagai macam teori maupun kebijakan ekonomi diterapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Secara ekonomi kesejahteraan hidup suatu negara biasa diukur melalui instrumen pertumbuhan ekonomi/PDB (growth), pendapatan per kapita (per capita income) dan indeks pembangunan manusia (human development indeks).

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah mulai melakukan spending review APBN terhadap indeks pembangunan manusia. Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto menyampaikan bahwa perbandingan volume APBN dengan IPM di Indonesia sebanding. Hal ini menunjukkan rendahnya outcome pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. Dalam tahap awal, objek spending review yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan baru sebatas APBN sedangkan spending Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Daerah Di Indonesia. review APBD masih menjadi wacana yang nantinya akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di 30 kota provinsi di Indonesia. Volume APBN saat ini terus meningkat sebesar tiga kali lipat dibanding tahun 2005. Kondisi itu ternyata belum sesuai dengan peningkatan angka IPM di Indonesia. Bila pada tahun 2005 volume APBN sebesar 509,6 triliun, sedangkan pada tahun 2011 jumlah APBN sebesar 1.320,8 triliun. Sementara itu, IPM Indonesia pada tahun 2005 berada pada nilai 0,572, sedangkan pada tahun 2011 dalam angka 0,617. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pertumbuhan nilai IPM Indonesia masih dibawah Thailand. Sedangkan Korea, yang memulai pertumbuhannya pasca krisis lalu bersama dengan Indonesia, saat ini nilai IPM Korea sudah jauh diatas Indonesia.

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Membahas spending review APBD tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu M. Yusuf, "Langkah Pengelolaan Aset Daerah", Decta Pitron Lugastoro, "Analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Bima", Aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat yang bersangkutan. Secara teoritis tujuan desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, membangun demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah. Dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintahan daerah akan lebih efisien dalam penyediaan barang-barang publik. Oates juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal juga meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, penerimaan keuangan daerah bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat tercapai jika pertumbuhan

ekonomi dapat meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan manusia tidak akan bertahan lama (sustainable) karena pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Blakely mengatakan dalam meningkatkan produktivitas, pemerintah dapat menggunakan strategi Local Economic Development (LED). Peningkatan produktivitas, akan menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi berikutnya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif-deskriptif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan diuji secara empiris. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial. Metode pengumpulan data ditentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Jadi pada skripsi ini penulis menggunakan kajian pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan dan data yang ada pada instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data juga dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, neraca atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima (Dalam Perpektif Ekonomi Islam).

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Syarat dalam analisis parametrik yaitu distribusi data harus normal. Sedangkan pengujian Normal Probability dapat dilihat pada output regresi, atau disajikan sebagai berikut: Gambar diatas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dari hasil regres di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$Y = 4,743 - 0,025X$$

Persamaan tersebut mengidentifikasi adanya hubungan negatif dan tidak searah antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien sebesar -0,025 (Negatif)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Jeneponto sebesar. Nilai signifikansi variabel PAD (X) sebesar 0,132 lebih besar dengan α pada taraf signifikansi 0,05 dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara PAD dengan IPM.

b. Uji t (Parsial)

1) Hipotesis

$H_0 : b = 0$ artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat muslim di Kabupaten Bima
 $H_a : b \neq 0$ artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat muslim di Kabupaten Bima

2) Taraf signifikan 5% atau $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (dk) = $n-2$. t hitung = -1,743 t table = 1,943

H_0 diterima apabila t hitung < t table

H_0 ditolak apabila t hitung > t table

3) Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa t hitung (-1,743) < t table (1,943) jadi H_0 diterima, kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada masyarakat Muslim di Kabupaten Bima.

c. Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Korelasi linear sederhana digunakan untuk mengukur keeratan hubungan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada masyarakat Muslim di Kabupaten Bima, dan analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel PAD terhadap tingkat IPM Muslim di Kabupaten Bima.

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,580. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel PAD dan Indeks Pembangunan Manusia pada masyarakat Muslim di Kabupaten Bima. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari pengkuadratan nilai R ($0,580 \times 0,580$) adalah sebesar 0,336 yang berarti bahwa kemampuan variabel PAD dalam menjelaskan variabel IPM pada masyarakat Muslim Kabupaten Bima sebesar 33,6%. Sisanya sebesar 66,4% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Gembira Marbun (2011) yang berjudul Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kota/Kabupaten Bima dengan nilai Adjusted R Square yang diperoleh dari hasil pengolahan sebesar 0,373219. Hal ini menunjukkan bahwa 37,32% variabel IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sisanya sebesar 62,68 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Hasil penelitian lain sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap (2010) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki hasil penelitian dengan Nilai Adjusted R Square adalah 0,373 mengindikasikan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 37,3% dan sisanya sebesar 62,7% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Variabel (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) (Variabel Y). Hal ini dapat dicermati dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel PAD (X) sebesar 0,132 lebih besar dengan α pada taraf signifikansi 0,05 dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2001.
- Dewi, Putu Ayu Krisna. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Efendi, Sofyan. Shahi Muslim. <http://.110mb.Com/> (23 juli 2008).
- Ilmiah. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/639> (26 Jul 2015 04:18:14 GMT).
- Indriantoro. Metodologi Untuk Aplikasi Dan Bisnis. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Jurnal Ilmiah, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28233/4/Chapter%20II.pdf>. (5 Agustus 2015:10:58 AM)
- Kuncoro, Mudrajat. Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Lugastoro, Decta Pitron. "Analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur". Jurnal
- Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Marsono. Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Mas'udi, Masdar Farid. Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: MIZAN, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nurtidarwati. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2011". Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alauddin, 2013.
- Pendapata Daerah Kabupaten Jeneponto 2008-2013, html . 20 Agustus 2013. (3 Novembe 2015)
- Profil Kabupaten Jeneponto, Bagian Sekretaris Daerah, Tahun 2014
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta, Bumi Aksara: 2010.
- RPJM Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018
- RPJP Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D. Bandung : Alfabet, 2009.
- Sunindiha. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Fak. Bina Aksara, 1987.
- Surakarta". Skripsi. Semarang: Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014.
- Triono, Dwi Condro. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara. BANTUL: IRTIKAZ, 2012.
- Triton PB, SPSS 13.0. Terapan: Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Yusuf, M. Langkah Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Yusuf, Noor Andi Fakhruddin. "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan